

# Yohana Dominggas Un

*by* Unitri Press

---

**Submission date:** 14-Aug-2022 09:55PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1882546553

**File name:** Yohana\_Dominggas\_Un.docx (38.48K)

**Word count:** 1365

**Character count:** 8633

**1**  
**PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MALANG DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO  
KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  
(Studi Kasus Pada Kantor Bkad Kota Malang)**

SKRIPSI

AKUNTANSI



Oleh:

YOHANA DOMINGGAS UN

2018110106

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

## **ABSTRAK**

Tingkat pengukuran terhadap sistem kinerja finansial sangat dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang jauh lebih terpenting untuk dapat dilakukan untuk dapat melihat pada tingkat dalam mencapai sebuah pelaksanaan sebuah misi yang sudah dilakukan pada sebuah kelompok atau organisasi serta pada tingkat sebuah hasil dalam sebuah tindakan atas pengukuran yang mana akan dapat memberikan sebuah tindakan atas motivasi serta sebuah arahan demi masa depan yang jauh lebih efektif. Sebagaimana pada hasil riset ini yang dapat diketahui bahwa tingkat keahlian terhadap sistem kerja terhadap keuangan PDK yang berada di Kota Malang periode 2017-2020 apabila dapat diketahui berlandaskan pada sebuah rasio kemandirian yang masih dalam bentuk konsiusatif, yang mana dapat didefinisikan minim, yang mana disebabkan karena dalam sistem peranan yang ada pada pihak pemerintah pusat dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan sistem pembangunan yang ada di Kota Malang jauh lebih baik dan tingkat kemandirian pada lapisan masyarakat untuk dapat membangun sebuah daerah dalam melakukan pembayaran retribusi serta perpajakan dapat dinyatakan masih minim. Adapun diketahui bahwa sebuah rasio efektivitas dalam kemampuan sebuah daerah Kota Malang yang mana dapat melakukan sebuah realisasikan pendapatan asli daerah pada periode 2017-2020 sebagaimana dengan sebuah target yang akan diterapkan sebagaimana berlandaskan pada sebuah data yang riil. Dapat dilihat berlandaskan pada sebuah rasio efisiensi serta sistem kinerja pada pemerintah Kota Malang dalam periode 2017-2020 dinyatakan baik

***Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Rasi Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi***

**PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Salah satu otonomi NKRI sebagaimana telah dituangkan dalam UU Tahun 2014 No 23 tentang sistem pemerintahan yang berada di daerah dalam melakukan sebuah tindakan pengurusan sebuah pemerintahan yang mana berlandaskan pada asas otonomi serta salah satu tugas yang akan membantu dengan berbagai mekanisme sebagaimana berlandaskan pada NKRI telah diadakan sebuah tindakan atas perubahan diperbaharui dengan Undang-undang Tahun 2022 No 1 yang mana akan berkaitan dengan korelasi finansial antara pihak pemerintah yang berada di pusat serta pihak pemerintahan yang berada di sebuah daerah yang mana merupakan sebuah tindakan dalam menciptakan sebuah alokasi sumber daya yang secara nasional dalam aspek keterbukaan serta akuntabel.

Hubungan terhadap adanya UU yang ada akan secara langsung akan melibatkan sebuah tindakan atas pergeseran paradigma dalam melakukan sebuah sistem pemerintahan yang serunya desentralisasi yang akan pula dilambungkan dengan tindakan atas pemberian otonomi yang secara nyata terhadap pajak daerah. (Astuti, 2015) menyatakan bahwa apabila dalam melakukan sebuah tindakan dalam mengelola sistem pemerintahan daerah sangat membutuhkan sebuah tindakan atas penilaian dalam melihat apakah sistem pengelolaan finansial apakah sudah secara baik atau belum dengan akan dapat menilai sebuah sistem kerja terhadap sebuah tindakan atas finansial yang ada pada sebuah daerah.

Pengukuran terhadap sebuah tindakan atas kerja dapat dijadikan pertimbangan atau memperbaiki sebuah tindakan atas sistem kinerja finansial yang akan dapat dipahami selama ini serta dapat pula dikatakan sebagai sebuah pandangan yang baik serta dapat pula dipergunakan untuk dapat melihat dengan berbagai mekanisme finansial. (Nur Ida Iriani, 2021) yang menyatakan bahwa situasi finansial yang akan dapat memberikan sebuah tindakan atas penilaian pada sistem kinerja finansial terhadap sebuah usaha yang mana akan dapat ditinjau kemandirian serta perimbangan secara efisien.

Dalam melihat tingkat keahlian sebuah sistem pemerintahan pada sebuah daerah yang mana akan dapat melakukan sebuah sistem otonomi daerah, sehingga perlu dilaksanakan sebuah tindakan untuk dapat mengukur sistem kinerja finansial pada sebuah daerah. Salah satu tindakan untuk dapat melihat sistem kinerja finansial ialah dapat dilihat berlandaskan pada

sebuah tindakan analisis rasio pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisa terhadap sebuah rasio pada anggaran pendapatan belanja daerah sangat dibutuhkan untuk dapat melihat pada tingkat keefektifan terhadap otonomi sebuah daerah, yang mana seharusnya dapat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kinerja finansial pada sebuah daerah. Pada riset ini sebuah rasio yang akan dipergunakan ialah analisis pada rasio finansial yang bersumber dari pada sebuah rasio kemandirian, efektivitas serta pada efisiensi.

Pada dasarnya sebuah rasio kemandirian pada sebuah daerah ialah untuk secara langsung dapat mengetahui pada tingkat keahlian sebuah finansial sebuah daerah dengan tujuan untuk dapat membiayai serta pengeluaran sebuah daerah ialah sejauh mana tingkat kontribusi terhadap setiap PAD. Pada total PAD dan beberapa PAD serta pada tingkat keefektifan sebuah target dalam sistem perencanaan pada sebuah tindakan realisasi (Sularso, 2011).

Tujuan dari sebuah rasio efektivitas ialah untuk dapat melihat serta dipergunakan untuk dapat mengukur pada tingkat kemampuan sebuah pemerintah untuk dapat memobilisasi sistem penerimaan terhadap sebuah pendapatan yang mana berlandaskan pada sebuah target. (Mahmudi, 2011 : 171). Adapun sebuah rasio efektivitas bertujuan untuk dapat melihat serta dapat menggambarkan sebuah pemerintah untuk dapat melakukan sebuah tindakan atas pengumpulan sumber penghasilan pada APBD yang menjadi sebuah target. (Rahmayati, 2016) menyatakan bahwa sistem pemerintahan daerah akan bisa untuk melakukan sebuah tugas apabila sebuah rasio akan digapai mencapai 100% atau angka 1 maka secara langsung akan meningkat terhadap rasio aktivitas sehingga sistem kinerja akan lebih baik. Adapun sebuah tujuan dari rasio efektivitas ini ialah untuk dapat melihat sejauh mana tingkat efisiensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat merealisasikan sebuah penghasilan semakin kecil, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mahmudi, 2011 : 171).

Pemerintah Kota Malang dapat diartikan sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi daerah dengan tujuan ialah dalam melakukan APBD yang ada pada Kota Malang, yang akan berpatokan pula pada Permendagri pada Tahun 2006 No 13 yang mana akan diawali dengan sebuah penetapan atas kebijakan KUA yang secara langsung akan dapat menjabarkan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mampu mendorong sistem anggaran pada sebuah pemerintah serta tugas dalam sebuah pelayanan yang diberikan terhadap lapisan masyarakat akan dapat didorong dengan berbagai jenis sumber dari sebuah daerah. Dalam sebuah sistem pengelolaan yang mana berlandaskan pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang akan berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah merupakan sebuah ukuran yang sangat mendasar dalam sebuah tindakan penyelenggaraan sistem pemerintahan serta pada aspek demokrasi, di samping itu juga tingkat potensi terhadap keanekaragaman yang sudah dituangkan dalam UU serta akan

dapat bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi bukan terhadap pimpinan negara dalam hal ini Presiden RI serta adanya tingkat kepastian terhadap sistem pelaksanaan sistem pemerintahan yang mana akan dapat diawasi berlandaskan pada lapisan masyarakat yang akan dilalui pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakang, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Dengan Menggunakan Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi”.

## **2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakang, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah bagaimana pengukuran KKP (Kinerja Keuangan Pemerintah) yang berada di Kota Malang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai 2020 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah untuk dapat mengetahui pengukuran KKP (Kinerja Keuangan Pemerintah) yang berada di Kota Malang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai 2020

## **4. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang dituangkan dalam tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah, secara teori untuk dapat memperluas pola pikir serta wawasan dan penambahan terhadap referensi terhadap riset-riset yang akan datang, yang mana akan berkaitan dengan ilmu akuntansi

### **2. Manfaat Akademis**

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah, untuk dijadikan sebuah kajian dalam memberikan sebuah konseptual terhadap riset yang akan datang, disamping itu juga akan selalu diharapkan untuk dapat mengembangkan pemahaman pendidikan diwaktu yang akan datang

### **3. Manfaat Praktis**

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dijadikan sebuah acuan pada KAD untuk dapat mengukur sistem kinerja finansial yang efektif yang mana akan dapat berkaitan kinerja keuangan sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## 5. Batasan Penelitian

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat melancarkan sebuah problem yang dihadapi :

1. LK APBD yang mana akan dapat diamati adalah sebuah LRA Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) tahun 2017 sampai 2020
2. Sistem kinerja finansial yang dimiliki oleh daerah, sehingga dalam riset ini dijadikan sebuah tindakan untuk dapat mengukur keefektifan berlandaskan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
3. Daerah yang diamati adalah BKAD yang berada di Kota Malang

# Yohana Dominggas Un

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	2%
2	Joko Tri Haryanto. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahu 2011-2015)", Inovasi, 2018 Publication	1%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	1%
6	Sherlock Halmes Lekipiouw. "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", SASI, 2020 Publication	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Yohana Dominggas Un

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---